



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN REGIONAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS CHUSAINI
2. Jabatan : ANALIS EKSEKUTIF
3. NHK : 440705

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 655.000.000

1. MOBIL, NISSAN XTRAIL MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 7.800.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 7.140.113.944

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 17.995.113.944

III. HUTANG

Rp. 233.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 17.762.113.944



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.